

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016)

Nabilah¹⁾, Rendy Sueztra Canalldhy²⁾

^{1),2),3)}, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang Kode Pos 30129

Email: nabilahbelen@gmail.com¹⁾, rendysueztracanadhy@gmail.com²⁾

ABSTRACT

The results of this study indicate that the function of OKI's inspectorate supervision on the performance of BKD OKI which has not been effective. This is due to its non-fulfillment of elements associated with Stoner's theory of Accurate, timely, focused on strategic monitoring points. Where BKD data at the time of collecting documents is incomplete as well as the existence of delays. The data that has not been completed by BKD is LP2P data and SOP. As well as in conducting inspection inspectorate apparatus has not determined the areas of irregularities that often occur, so that the impact is not corrective in performing performance in the BKD. Factors that affect the implementation of the inspectorate supervision of the performance of Personnel and Training Agency OKI Regency is an internal factor, namely as the supervisory apparatus and external factors, that are facilities and infrastructure and some negligence by the object inspection

Keywords : Effectiveness, Supervision, Inspectorate, BKD

1. Pendahuluan

Keberhasilan dalam suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan (Rachmawati, 2008 : 1). Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. Aspek manajemen suatu organisasi diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara optimal. Selain itu pula pentingnya pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan (Handyaningrat, 1996 : 150).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dengan pelaksanaan dan pembentukan aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tupoksi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Pembahasan mengenai kinerja organisasi pemerintah dalam kabupaten/kota menjadi hal yang sangat menarik. Di Indonesia sendiri organisasi pemerintah sering di identikkan dengan pegawai negeri sipil yang lamban korupsi dan berbagai instansi pemerintahan yang melanggar disiplin kerja. Dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah, salah satu Institusi yang memegang peranan penting dalam pengembangan dan pembinaan aparatur pemerintahan adalah Badan Kepegawaian dan Diklat.

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan lembaga teknis daerah yang membantu Bupati bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian daerah di Kab OKI. BKD dituntut untuk melaksanakan pelayanan prima yang efektif dan efisien, menciptakan aparatur yang beriman dan berkualitas, serta menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang baik dan meningkatkan sumberdaya aparatur yang lebih profesional dan sejahtera. Untuk itu diperlukan pengawasan yang baik.

Penulis tertarik untuk mensinkronisasi antara dua instansi negara di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki peranan penting yakni Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah dan pertanyaan penelitian adalah apakah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap intansi BKD, atau tidak memberikan pengaruh apapun. Masalah yang sering terjadi dipicu dengan tidak disiplinnya pegawai yang akan berdampak pada kinerja. Sering terlambatnya pegawai dalam menghadiri apel maupun bolos dalam jam kerja.

Pertanyaan penelitian:

- 1) Apakah fungsi pengawasan Inspektorat sudah efektif terhadap kinerja pegawai BKD Kab. OKI?
- 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja pegawai BKD Kab. OKI?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan efektivitas fungsi dan peranan pengawasan inspektorat terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

- 1) Data Primer, meliputi obeservasi dan interview atau wawancara mendalam
- 2) Data Skunder, meliputi studi pustaka dan dokumentasi arsip-arsip.

C. Kerangka Teori

Pengawasan Efektivitas menurut Stoner; Akurat, Tepat waktu, Fokus pada titik pengawasan strategis, Realistis secara ekonomis, Terkoordinasi dengan aliran kerja, Prespektif dan operasional, Diterima para anggota organisasi.

2. Pembahasan

A. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan pengawasan yang dilaksanakan setiap tahun terhadap semua satuan kerja perangkat daerah mulai dari Dinas, Badan, Kecamatan sampai Kelurahan. Salah satu organisasi pemerintahan daerah yang dianggap penting untuk dilakukan pengawasan secara komprehensif oleh Inspektorat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) sebagai Instansi pemerintahan yang memegang peranan penting dalam seluruh pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pentingnya peran dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah maka perlu dilakukan penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap kinerja BKD Kabupaten OKI (Rendy Sueztra Canadhy : 2017). Oleh karena itu penilaian yang dilakukan Inspektorat Kabupaten OKI terhadap kinerja BKD Kabupaten OKI bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan

fungsi-fungsi organisasi dijalankan dalam periode satu tahun berdasarkan RENJA (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten OKI.

Untuk menciptakan pengawasan yang baik Inspektorat Kabupaten OKI menekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pertanggung jawaban hasil pengawasan.

Dalam pembuatan Program Kerja Tahunan tentu tidak terlepas dari target yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten OKI dalam menunjang Visi dan Misinya. Hal tersebut terurai dalam tabel berikut :

Tabel 1. Rencana Pencapaian Sasasaran Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2016

| Tujuan | Indikator | Target 2016 |
|---|---|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran & melakukan prancanaan penganggaran dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan | 1. Penyediaan pendukung adm perkantoran 2. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan tugas melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai | 100% 100% |
| 2. Terwujudnya Sistem Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1. Tingkat ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja & pelaporan 2. Ketersediaan SOP 3. Presentase penilaian dalam evaluasi LAKIP | 100% 90% 90% |
| 3. Terciptanya Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang profesional & kompeten | 1. Jumlah Aparatur pemeriksa yang mengikuti diklat dan bersertifikat auditor | 25 org |
| 4. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang berkualitas, efektif dan efisien. | 1. Persentase hasil pemeriksaan evaluasi tepat waktu 2. Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti 3. Persentase pengaduan masyarakat ke | 95% 95% 95% 100% |

| | | |
|----|---|--|
| | APIP yang ditindaklanjuti | |
| 4. | Tingkat penyelenggaraan SPIP di Kab OKI | |
| 5. | Pemeriksaan yang komprehensif terhadap unit kerja di jajaran Pemkab. OKI secara berkala | |

Sumber : LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Okl 2016

B. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat terhadap BKD

Pengawasan dapat dikatakan efektivitas apabila sistem pengawasan tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penulis menetapkan indikator dari pendapat yang dikemukakan oleh teori Stoner bahwa pengawasan yang efektif harus memiliki:

1) Akurat

Artinya informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Hal ini untuk menghindari koreksi yang keliru akibat proses pengawasan memperoleh data tidak akurat. Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat dalam memperoleh data terhadap BKD belum terlaksana secara akurat, dikarenakan data yang diperoleh dari BKD belum lengkap dan terjadi keterlambatan dalam pengumpulan.

2) Tepat Waktu

Artinya Data yang dikumpulkan, dan disampaikan harus dilaksanakan secara cepat dan tepat. Pengawasan Inspektorat terhadap BKD dalam unsur tepat waktu tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan terjadinya keterlambatan dalam penyediaan dokumen.

3) Fokus pada titik pengawasan yang strategis

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan yang paling sering terjadi. pengawasan Inspektorat terhadap kinerja BKD belum terlaksana secara efektif dikarenakan dalam melakukan pemeriksaan aparat pengawas belum menetapkan bidang-bidang penyimpangan yang paling seringkali terjadi dan hasil pengujian yang sudah dilakukan belum terpusat, sehingga dampaknya tidak korektif dalam melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan kinerja pada BKD.

4) Realistis secara ekonomi,

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat telah memenuhi dalam indikator tersebut, hal ini dapat dilihat dari tabel realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten OKI.

Tabel 2. Inspektorat Kabupaten OKI
Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Tahun 2016

| N O | Uraian | TA 2016 | | |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|-------|
| | | Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Belanja Pegawai | 223.540.000 | 221.690.000 | 99,98 |
| 2 | Belanja Brg & Jasa | 3.367.010.000 | 3.361.539.15 | 99,10 |
| 3 | Belanja Modal | 166.950.000 | 166.500.000 | 99 |
| Jumlah Belanja | | 3.757.500.000 | 3.749.729.152 | 99,94 |

Sumber : LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Okl 2016

5) Terkoordinasi Alira Kerja Organisasi

Informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan. Pengawasan Inspektorat dalam unsur ini sudah dilaksanakan dengan adanya tata kerja Inspektorat Kabupaten OKI, sehingga dapat terkoordinasi dalam setiap personalia yang menjalankan pengawasan.

Berikut tata kerja Inspektorat Kabupaten OKI yaitu;

- Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Kabupaten, sekretaris, inspektur pembantu, kepala sub bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkup Inspektorat dan antara satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- Setiap pimpinan unit dalam lingkup Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing memberikan bimbingan, petunjuk petunjuk dan ketauladanan dalam melaksanakan tugas.
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan bertanggungjawab kepada inspektur Kabupaten serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- Para inspektur pembantu wilayah menyampaikan laporan kepada inspektur Kabupaten dan sekretaris menyusun laporan berkala, untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati.
- Dalam hal inspektur Kabupaten berhalangan melaksanakan tugasnya, maka inspektur kabupaten dapat menunjuk sekretaris atau salah seorang inspektur pembantu untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Prespektif dan Operasional

Yaitu sistem pengawasan efektif harus menunjukkan deteksi atau tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Dalam hal ini inspektorat telah menentukan standar pengawasan dan melakukan tindakan koreksi apa yang akan diambil.

Setiap objek SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan dan melaksanakan evaluasi terhadap setiap laporan pelaksanaan. Pelaksanaan tindak lanjut maksimal 7 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh objek SKPD.

Untuk meng-update pelaksanaan yang ditindak lanjut setelah 3 (tiga) bulan dilaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan demikian akan dapat diketahui:

- Jumlah temuan yang telah ditindak lanjuti sesuai dengan saran/ rekomendasi pemeriksa;
- Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi;
- Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian;
- Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan saran/ rekomendasi.

Dalam pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap BKD mendapatkan temuan tidak lengkapnya data LP2P serta SOP pada BKD. Maka dari itu tindakan koreksi yang dilayangkan Inspektorat terhadap BKD yaitu dengan memberikan surat rekomendasi terhadap Bupati mengenai temuannya pada Laporan Hasil Pemeriksaan, bahwa Standar Operasional Pegawai BKD harus segera di Perda kan dan melengkapi data LP2P dan dikumpulkan lagi setelah tiga bulan terhitung dari pembuatan tindak lanjut evaluasi.

7) Dapat diterima Para Anggota Organisasi

sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dan mendorong tanggung jawab. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten OKI telah memenuhi unsur tersebut. Aparat pengawas Inspektorat dalam melakukan pengawasan sudah dilakukan secara terarah dan terkoordinir dengan adanya mekanisme pemeriksaan.

Mekanisme pemeriksaan

- Koordinasi rencana pemeriksaan
- Pengumpulan dan penelaahan informasi umum mengenai objek yang diperiksa
- Penyusunan pokok kerja pemeriksaan
- Pelaksanaan pemeriksaan
- Pelaporan hasil pemeriksaan

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi tidak Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap BKD

Dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional pada penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan pengawasan yang terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam hal ini pelaksanaan terhadap kinerja Badan Kepegawaian dan Daerah (BKD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Faktor-faktor tersebut yakni:

1) Faktor internal

yaitu aparat pengawas, Dalam hubungannya dengan uraian diatas yang menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap Kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu aparat pengawasan dalam hal ini tenaga pemeriksaan yang belum menetapkan bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi pada Instansi BKD. Sehingga akan berdampak tidak korektifnya dalam hal pengawasan dan dapat memicu terjadinya kesalahan yang sama pada tiap tahunnya.

2) Faktor eksternal

Yaitu ketersediaan sarana prasarana dan kelalaian pada objek pemeriksaan. Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap BKD, indikator sarana dan prasarana menjadi bagian penting sebagai pendukung tugas pengawasan. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila dengan tersedianya kendaraan dinas atau operasional kantor, serta tersedianya perlengkapan kantor. Maka akan terciptanya sistem yang akuntabilitas dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sarana dan prasana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir belum menunjang kebutuhan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap SKPD di Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengingat banyak instansi yang harus diperiksa Inspektorat Kabupaten OKI memiliki terbatasnya kendaraan operasional/ perlengkapan kantor.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana yang diberikan, faktor lain yang ditemukan adanya dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan itu terlambat diberikan. Selain itu tidak lengkapnya dokumen pada saat pengumpulan mengakibatkan tidak akuratnya data.

Berdasarkan kesimpulan mengenai efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap BKD sudah terlaksana dengan baik namun masih belum efektif, dikarenakan tidak memenuhi indikator-indikator yang dikemukakan teori stoner. Karena apabila salah satu dari indikator tersebut belum terlaksana maka pengawasan tersebut belum bisa dikatakan efektif (Amaliatulwalidain : 2017). Selain itu adanya faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat. Dimana indikator akurat, tepat waktu, fokus pada titik pengawasan strategis yang tidak memenuhi unsur pengawasan Inspektorat terhadap BKD. Kurangnya data serta tidak tepatnya waktu dikarenakan keterlambatan dalam pengumpulan berkas yang disebabkan kurangnya koordinasi dari instansi Inspektorat dan BKD.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian mengenai fungsi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja pegawai BKD Kabupaten OKI maka penulis dapat membuat kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten OKI terhadap BKD Kabupaten OKI belum terlaksana secara efektif, hal ini berlandaskan berdasarkan teori Stoner mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang dengan Akurat, Tepat waktu, fokus pada titik pengawasan strategis, realistis secara ekonomi, Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, prospektif dan operasional, dan dapat diterima para anggota organisasi. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap BKD tidak memenuhi indikator akurat, tepat waktu, fokus pada titik pengawasan strategis, hal tersebut dikarenakan tidak lengkapnya data BKD serta adanya keterlambatan dalam pengumpulan berkas. Data tersebut merukan data LP2P (Laporan Pajak-pajak Pribadi) serta data SOP BKD. Serta pemeriksaan belum dapat diputuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi di Instansi BKD.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Inspektorat terhadap Badan Kepegawaian dan Diklat yaitu faktor Internal dan Eksternal
 - Faktor Internal yaitu aparat pengawasan dalam hal ini tenaga pemeriksaan yang belum menetapkan bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi pada Instansi BKD. Sehingga akan berdampak tidak korektifnya dalam hal pengawasan dan dapat memicu terjadinya kesalahan yang sama pada tiap tahunnya Sarana dan prasarana
 - Faktor Eksternal, Faktor lain yang menghambat pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) adanya faktor eksternal yakni berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang diberikan serta adanya kelainan yang dilakukan objek pemeriksaan

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disampaikan saran-saran yang dirangkum sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten OKI harus lebih ditingkatkan lagi, yaitu perlu adanya komitmen dan kerja keras serta keseriusan sehingga upaya upaya menyimpang, tidak akuratnya data atau tidak optimalnya pelaksanaan tupoksi aparat/ dapat dimonitor secara menyeluruh dan berkesinambungan serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- 2) Perlu ditingkatkan pemantapan koordinasi antara Instansi Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Diklat guna kelancaran proses pengambilan data

agara tidak terjadi keterlambatan data untuk tahun berikutnya.

- 3) Kepada instansi Badan Kepegawaian dan Diklat perlunya perhatian khusus agar lebih memperhatikan ketersediaan data yang belum lengkap serta mempercepat melakukan Perda yang mengatur SOP BKD supaya fungsi dan tugas yang dijalankan berjalan dengan optimal.

Daftar Pustaka

- Amaliatulwalidain. *Dosen Ilmu Pemerintahan UIGM*. 2017.
- Badan Kepegawaian dan Diklat. 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) : Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Canaldhy, Rendy Sueztra. *Dosen Ilmu Pemerintahan UIGM*. 2017.
- Gibson dkk. 2000. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses*. Penerjemah: Djoerban Wahid. Jakarta : Erlangga
- Lembaga Administrasi Negara Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan. 2009. *Modul 3 Diklat Kepemimpinan Tingkat II*. Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : HJ Masagung.
- Inspektorat. 2016. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) : Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, Dra., Mpd. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung : Mandar Maju.
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Stoner, James A.F. 1982. *Management edisi dua*. New York : Prentice-hall inter national, Inc, Englewood Cliffs.
- Buku dari Irawan Soejito yang berjudul "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Wandi Harmawan. 2014. *Analisis Fungsi Pelaksanaan Inspektorat Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. Di dalam skripsi melalui alamat web : www.script.com.
- Purwanti Mariani. 2010. *Peranan Inspektorat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Bandung*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 pasal 16 ayat (1) tentang Tugas Pokok dan Fungsi BKD
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Nomor 2 Tahun 2016 tentang TUPOKSI Inspektorat
- Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah